

BESUK KIAMAT (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian)

Azhalola Testiana*

Program Studi Magister Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
email: azhalolatestiana@gmail.com

RinaHerlinaHaryanti

Program Studi Magister Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
email : rinaherlinaharyanti@staff.uns.ac.id

KristinaSetyowati

Program Studi Magister Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
email : kristina@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Besuk Kiamat merupakan akronim dari Belasungkawa Kirim Akta kematian. Ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan menciptakan kedekatan pemerintah dengan masyarakat dalam proses mendapatkan akta kematian secara efektif dan efisien dalam kerangka inovasi pelayanan publik. Dalam konteks kebencanaan, program ini dapat membantu pemulihan suatu daerah pasca bencana dari segi sensus penduduk serta perolehan administrasi kependudukan keluarga duka. Besuk Kiamat mendeskripsikan skema inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menanggulangi rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan administrasi kependudukan khususnya akta kematian serta membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperbaharui data jumlah penduduk. Skema inovasi Besuk Kiamat mencakup permohonan akta kematian, entry data ke SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), scan berkas dan upload ke SIAK, pelaporan peristiwa kematian melalui (*whatsapp*), verifikasi berkas dan cetak produk (Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk), serta penyerahan berkas kepada keluarga yang berduka. Besuk Kiamat berdasarkan analisis *sustainable development* adalah faktor pendukung tercapainya SDG's. Besuk Kiamat menyoal pendataan penduduk terutama data kematian. Pembangunan berkelanjutan hanya akan tercapai jika data penerima manfaat pembangunan tersusun dengan baik dan dimutakhirkan. Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akta kematian. Replikasi inovasi ini di daerah bencana diharapkan memudahkan pemerintah setempat dalam mengelola administrasi kependudukannya.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Kematian, Inovasi, Pelayanan Publik, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Bencana Alam di Lombok Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 menjadi catatan peristiwa tragis bagi bangsa Indonesia. BNPB menaksir kerugian material mencapai Rp 7,7 triliun dan tercatat jumlah korban jiwa mencapai 515 orang serta korban luka-luka 7.145 orang (Wismabrata, 2018). Pasca gempa, pembangunan kembali Lombok menjadi pekerjaan rumah terbesar. Banyaknya penduduk yang meninggal dan mengalami luka-luka berimplikasi pada data kependudukan daerah tersebut. Oleh karenanya, pasca bencana pendataan penduduk menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Karena bagaimanapun perencanaan dan penganggaran

pembangunan yang adil dan merata harus dilakukan berdasarkan data penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa administrasi kependudukan memiliki esensi yang penting dalam pembangunan.

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Undang-undang ini kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan penduduk melalui jemput bola atau pelayanan keliling. Cakupan dari administrasi kependudukan adalah penerbitan dokumen kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Produknya antara lain terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Kartu Intensif Anak (KIA) dan lain-lain. Produk administrasi kependudukan menjadi identitas diri bagi masyarakat. Dari sisi politik, apabila seseorang tidak memiliki identitas yang menerangkan tentang domisili maka orang tersebut tidak memiliki hak pilih. Begitu pun dari sisi pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan dari pemerintah, kepemilikan administrasi kependudukan menjadi syarat utama bagi penerima. Misalnya, jika pemerintah ingin menyalurkan bantuan beras bagi penduduk di daerah X, maka penduduk di daerah X tersebut harus memiliki identitas yang membuktikan bahwa ia benar-benar penduduk X dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat, termasuk data kematian. Berbagai inovasi telah dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Suwarta (2018) mengemukakan bahwa Dispendukcapil selama ini mencoba untuk memberikan kemudahan, kedekatan, kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi yaitu: *Pertama*, pengembangan data perekaman sehingga memudahkan untuk administrasi kependudukan; *Kedua*, pelayanan pembuatan/pembaharuan KTP yang hanya memakan waktu satu (1) jam; *Ketiga*, pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) secara online; *Keempat*, penerbitan Kartu Intensif Anak (KIA); *Kelima*, sejak tahun 2008, secara bertahap seluruh kecamatan dan sebagian kelurahan menginovasi penataan ruang pelayanan secara modern dan alur pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan; *Keenam*, Inovasi Besuk Kiamat (Bela Sungkawa Kirim Akta kematian). Penataan ini bertujuan mempermudah penyelenggara untuk memberikan pelayanan prima serta berupaya untuk memenuhi standar pelayanan publik (SPP), dan juga mempermudah masyarakat mendapatkan manfaat dari suatu birokrasi yang efektif dan efisien.

Besuk Kiamat adalah salah satu inovasi yang menjadi unggulan Kota Surakarta. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. Pasca hadirnya inovasi Besuk Kiamat, terjadi peningkatan kepemilikan akta kematian. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Peristiwa dan Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017

No	Kecamatan	Peristiwa	Penerbitan Akta
1	Laweyan	576	800
2	Pasar Kliwon	338	678
3	Serengan	464	404
4	Jebres	916	1.007
5	Banjarsari	993	1.331
	Surakarta	3.287	4.220

Sumber: Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 tentang jumlah peristiwa dan penerbitan akta kematian per kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017, dapat dikatakan bahwa dengan adanya inovasi program Besuk Kiamat, tingkat kesadaran masyarakat Kota Surakarta akan pentingnya kepemilikan akta kematian semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan penerbitan akta kematian atas peristiwa kematian sebelum tahun 2017.

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat akan data kependudukan. Inovasi Besuk Kiamat juga dinilai sebagai inovasi yang menunjukkan bahwa pemerintah semakin menghargai masyarakat dengan memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin agar masyarakat mudah dalam pengurusan kepemilikan administrasi kependudukan khususnya akta kematian. Dalam konteks kebencanaan, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap penduduk yang tertimpa musibah. Penduduk yang tertimpa musibah khususnya bencana alam, mereka tidak sempat memikirkan pembaharuan administrasi kependudukan. Melalui inovasi yang dilakukan, diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat khususnya keluarga duka. Keberlanjutan program ini, selain warga duka mendapatkan administrasi berupa akta kematian, kartu tanda penduduk baru, dan kartu keluarga baru, diharapkan keluarga duka mendapatkan santunan dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka persoalan administrasi kependudukan adalah salah satu hal yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, terutama terkait data kematian.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana inovasi Besuk Kiamat diciptakan dan diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Penggambaran hal itu diharapkan kelak mampu direplikasi salah satunya oleh Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat pasca Gempa 2018. Inovasi ini diharapkan dapat membantu pemulihan suatu daerah pasca bencana dari segi sensus penduduk serta perolehan administrasi kependudukan khususnya warga Lombok.

METODE

Implementasi Inovasi Besuk Kiamat dilakukan melalui serangkaian metode. Dalam metode ini Pemerintah memegang kunci suksesnya inovasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Inovasi ini dilakukan melalui empat proses inovasi, yaitu: 1) Pencetusan sebuah ide berdasarkan

permasalahan yang terjadi di masyarakat; 2) Merencanakan sebuah inovasi ke dalam konsep yang matang serta melakukan eksperimen awal; 3) Menentukan kelayakan melalui tahap *Drum Up, Diagnose, Design, Delivery, dan Display*; 4) Mengimplementasikan sebuah inovasi termasuk di dalamnya mengevaluasi sebuah inovasi guna keberlanjutan inovasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penciptaan Ide : Langkah Awal

Besuk kiamat merupakan sebuah inovasi unggulan yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kota Surakarta. Inovasi ini awalnya diberi nama ‘basuki amat’, namun agar mudah diingat oleh masyarakat akhirnya diubah menjadi Besuk Kiamat. Program yang direncanakan dari tahun 2015, baru diujicobakan pada Agustus 2017. Inovasi Besuk Kiamat diciptakan dengan latar belakang masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kepemilikan akta kematian sebagai administrasi kependudukan serta menciptakan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat. Besuk Kiamat merupakan program inovasi proses. Dampak yang dihasilkan dari adanya Besuk Kiamat diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kematian, serta bagi dinas diharapkan dapat digunakan sebagai akurasi data. Program inovasi ini telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Utomo (2017), “Sebuah produk muncul dari spontan, kreatifitas, kecerdasan dan pengolahan informasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar”.

Ide Besuk Kiamat muncul setelah Dispendukcapil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) terkait inovasi yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surakarta, Kartu Insentif Anak dan Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran, yang merupakan salah satu dari 33 Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014.



Sumber : Dokumentasi Dispencudcapil Kota Surakarta, 2017

Gambar 1. Penghargaan dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014

Tujuan diadakannya program Besuk Kiamat berorientasi kepada nawa cita agenda pembangunan nasional yang digalakkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dimana program utamanya meningkatkan pengurusan akta kematian yang selama ini tergolong masih rendah karena masyarakat lebih percaya dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan, termasuk di dalamnya kepengurusan hak waris. Besuk Kiamat merupakan inovasi yang memiliki tujuan yang jelas, sehingga baik untuk diterapkan di dalam pelayanan kepada masyarakat karena memiliki kebermanfaatannya. Besuk kiamat bermanfaat untuk pemenuhan administrasi kependudukan yang tidak mempersulit masyarakat dalam memperolehnya, karena selain mudah inovasi ini tidak dipungut biaya. Dengan adanya inovasi ini diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga kevalidan data penduduk di Dispendukcapil Kota Surakarta ter – *up to date*.

Eksperimen Awal : Lima Kelurahan menjadi Pilot Project

Sebelum pembuatan inovasi program Besuk Kiamat, Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta mengumpulkan para Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkup Dispendukcapil guna merencanakan program tersebut dalam *focus group discusion (FGD)*. *Focus Group Discussion (FGD)* dengan membahas tahapan-tahapan beserta komponen-komponen pendukung dalam pelaksanaan Besuk Kiamat. Eksperimen awal dalam mematangkan program ini, dilakukan pada 5 (lima) kecamatan, dimana masing-masing

kecamatan diwakili oleh 1 (satu) kelurahan sebagai *pilot project* uji coba. Uji coba tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan ide baru yang muncul, dan selanjutnya dipersiapkan untuk diimplementasikan.

Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dispendukcapil Pemerintah Kota Surakarta, memaparkan daerah yang menjadi *pilot project* serta jumlah pengujian disetiap bulan berdasarkan penerbitan akta kematian, antara lain:

Tabel 2. Penerbitan Akta Kematian Besuk Kiamat Tahun 2017

No	Kecamatan	Kelurahan	Agst	Sept	Okt	Nov	Total
1	Laweyan	Pajang	0	2	8	2	12
2	Serengan	Serengan	2	0	2	2	6
3	Pasar Kliwon	Semanggi	0	5	11	2	18
4	Jebres	Jebres	0	2	9	4	15
5	Banjarsari	Kadipiro	5	3	9	4	21
Total			7	12	39	14	72

Sumber: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 2018

Besuk kiamat dilakukan pengujian dari Bulan Agustus hingga Bulan November 2017 dengan total pengujian 72 (tujuh puluh dua) kali. Adapun daerah yang menjadi *pilot project*, yaitu Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan, Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan, Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon, Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, dan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari (solopos.com, 2017). Daerah tersebut menjadi *pilot project* program inovasi karena daerah tersebut tercatat sebagai daerah padat penduduk. Pengujian terhadap sebuah ide yang baru perlu dilakukan agar membuktikan hasil dan konsekuensinya sehingga pengujian tersebut menjadi acuan evaluasi untuk perbaikan inovasi tersebut. Adapun anggaran biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan inovasi Besuk Kiamat berasal dari APBD Kota Surakarta.

Penentuan Kelayakan: Penilaian dari Lembaga Administrasi Negara

Program Besuk Kiamat melalui proses kelayakan sebuah inovasi. Setiap tahap inovasi mendapat pantauan secara terus menerus sebagai wujud perbaikan atas sebuah inovasi yang kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang menjalankan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pembentukan inovasi administrasi kependudukan Besuk Kiamat yaitu:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretaris, yang berperan sebagai moderator dalam penyusunan serta penanggung jawab;
2. Sekretariat berperan sebagai pengelola administrasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Bidang Pendaftaran Penduduk bertugas sebagai penerbitan identitas penduduk (KTP);
4. Bidang Pencatatan Sipil berperan sebagai verifikator berkas pemohon pencatatan kematian;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertugas melaksanakan sosialisasi pengelolaan administrasi kependudukan (besuk kiamat);

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan bertugas sebagai penyusun program inovasi Besuk Kiamat.

Keterlibatan pihak-pihak yang terkait pada inovasi program Besuk Kiamat membantu kelancaran program serta mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dari program tersebut dengan cara mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam pembentukan program Besuk Kiamat, yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kota diantaranya, puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai pihak yang mengeluarkan visum penyebab kematian seseorang;
2. Pejabat kelurahan yang ditunjuk sebagai *pilot project*, sebagai petugas yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat keterangan kematian;
3. Dispendukcapil, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian setelah berkas yang dikumpulkan atau dikirimkan melalui media elektronik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Diskominfo&SP, sebagai penyedia sarana dan prasarana berupa jaringan internet dan aplikasi program Besuk Kiamat

Segi sarana prasarana yang perlu diperhatikan dalam penyusunan inovasi besuk kiamat, diantaranya

1. Peralatan/ sarana prasarana yang memadai di semua kelurahan, tersedia scanner untuk upload data;
2. Koneksi jaringan yang stabil;
3. Sumber daya manusia yang mahir mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi.

Kelayakan implementasi inovasi sebuah program harus melalui kriteria inovasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kriteria tersebut adalah :

1. Kompetibel dengan sistem di luar dirinya
2. Berkesinambungan
3. Mampu memberikan solusi
4. Adanya kemanfaatan

Proses inovasi program Besuk Kiamat harus melalui beberapa tahap sehingga dapat dikatakan layak untuk diimplementasikan. Tahap tersebut diantaranya:

1. *Drum Up*, tahap pembangkit semangat kepada dinas sehingga muncul keinginan untuk menciptakan sebuah inovasi.



Sumber : Dokumentasi BKPPD, 2017

Gambar 2. Akselerasi Laboratorium Inovasi Kota Surakarta
(*Drum Up&Diagnose*)

2. *Diagnose*, tahap ini mengidentifikasi potensi yang dimiliki Dispendukcapil untuk menggali dan memunculkan ide inovasi.
3. *Design*, Dispendukcapil mendesain Besuk Kiamat melalui *focus group discussion* mengenai siapa yang akan menjalankan serta bagaimana program ini berjalan dengan tugas masing-masing.
4. *Delivery*, melalui tahap ini Besuk Kiamat dapat dimonitoring dan memperoleh evaluasi
5. *Display*, Inovasi Besuk Kiamat dipamerkan pada gelar inovasi Pemerintah Kota Surakarta.

Implementasi : Mewujudkan Pendataan Akurat Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi alur proses Besuk Kiamat berawal dari pemohon (keluarga/yang dikuasakan) datang ke kelurahan membawa surat keterangan dari RT dan RW, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri. Kemudian petugas di kelurahan melakukan *scan* berkas untuk di-*entry* ke SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), selanjutnya berkas tersebut dilaporkan kepada petugas Dispendukcapil melalui *whatsapp*, kemudian verifikasi berkas dan cetak 3 in 1 (meliputi akta kematian, KK baru dengan pengurangan jiwa dan KTP Suami/ Istri dengan perubahan status). Setelah dokumen siap lalu diantar ke kelurahan dan Lurah menyerahkan ke keluarga duka sekaligus berbela sungkawa.



Sumber : Dokumentasi Dispendukcapil ,2017

Gambar 3. Alur Proses Besuk Kiamat

Harapan kedepan terhadap keberlanjutan program ini adalah santunan yang diberikan kepada keluarga duka agar dapat meringankan beban hidup keluarga duka serta mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Dengan inovasi ini diharapkan SDG's sebagai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud karena telah didukung oleh pendataan yang akurat, salah satunya melalui data kematian.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Inovasi Besuk Kiamat adalah inovasi pendukung pembangunan berkelanjutan, karena melalui Besuk Kiamat setidaknya pengelolaan data kematian telah dikelola dengan baik dan *updating* sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan akan di dasarkan pada data penerima manfaat pembangunan yang akurat; *Kedua*, Inovasi besuk Kiamat adalah wujud kongkrit pelaksanaan UU No 24 tahun 2013 tentang kewajiban Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik berbasis jemput bola, dalam Konteks ini negara hadir untuk masyarakat melalui inovasi yang dibuat. Negara memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.; *Ketiga*, Inovasi besuk Kiamat terlaksana melalui serangkaian proses yaitu tahap 1) penciptaan ide yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bekerjasama sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2) Eksperimen awal yang dilakukan pada 5 (lima) kelurahan sebagai *pilot project* uji coba. Uji coba tersebut dimanfaatkan untuk megembangkan ide baru yang muncul, dan selanjutnya dipersiapkan untuk diimplementasikan. 3) Penentuan kelayakan melalui tahap *Drum Up, Diagnose, Design, Delivery, dan Display*, 4) Implementasi inovasi ini dilaksanakan setelah keluarga duka melapor ke kelurahan dan dilanjutkan ke Dispendukcapil untuk diproses hingga muncul Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan perubahan status dan diantar ke keluarga duka. *Keempat*, Inovasi ini memungkinkan direplikasi oleh berbagai pihak, termasuk oleh Nusa Tenggara Barat pasca Gempa Lombok 2018.

Daftar Pustaka

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. 2017. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2014. *Modernisasi Adminduk Surakarta Masuk Putaran Kedua UNPSA 2014*. <https://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2320-modernisasi-adminduk-surakarta-masuk-putaran-kedua-unpsa-2014> (Diakses pada tanggal 28 April 2017 pukul 21.45)
- _____. 2016. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 2016. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Tribun Solo.com. 2016. Dispendukcapil Solo Gagas Pendaftaran permohonan e-ktip secara online. (diakses dari <http://solo.tribunnews.com/2016/08/06/dispdukcapil-solo-gagas-pendaftaran-permohonan-e-ktip-secara-online> pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 22.12)
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 4674. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Utomo, Tri Widodo Wahyu. 2017. *Inovasi Harga Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardani, Indah S. 15 November 2017. *OPD Beradu Inovasi Program dengan Nama Unik*. Solopos, hlm .1.